

## Trading Bursa Carbon Indonesia Peluang atau Ancaman bagi Lingkungan?

Muhamad Afifullah<sup>1</sup>, Imam Haryanto<sup>2</sup>, Muthia Sakti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UPN Veteran Jakarta

<sup>2</sup>UPN Veteran Jakarta

<sup>3</sup>UPN Veteran Jakarta

Corresponding email: [muhamadafifullah@gmail.com](mailto:muhamadafifullah@gmail.com)

**Abstrak:** Perdagangan emisi karbon menjadi fokus utama dalam upaya menangani dampak perubahan iklim global. Strategi perdagangan emisi karbon dan konsep keadilan lingkungan. Strategi perdagangan emisi karbon diakui sebagai solusi yang efektif untuk mengurangi emisi karbon dengan memungkinkan entitas untuk memperdagangkan kelebihan emisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini normatif yuridis dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pembentukan IDX Carbon melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2023, menjadi tonggak penting dalam pengaturan perdagangan emisi karbon. Proyek-proyek seperti Katingan Mentaya menunjukkan pentingnya izin restorasi ekosistem dalam menjalankan kegiatan penyimpanan dan penyerapan karbon sesuai dengan regulasi. Konsep keadilan lingkungan menggaris bawahi pentingnya kesetaraan akses terhadap sumber daya dan kekuasaan serta pengakuan hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang baik. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam bursa karbon, tantangan seperti peningkatan beban finansial bagi industri padat emisi dan dampak negatif bagi masyarakat adat harus diatasi. Pentingnya kebijakan perdagangan karbon yang memperhatikan masyarakat adat dan lokal. Oleh karena nya kebijakan perdagangan karbon harus mempertimbangkan manfaat ekonomi, ekologis, dan keberlanjutan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Diharapkan bahwa implementasi

perdagangan karbon yang bijaksana dapat membawa manfaat yang signifikan dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan mencapai keadilan lingkungan yang lebih luas.

**Kata Kunci:** *IDX Carbon, Trading Emisi Carbon, masyarakat adat*

## A. Pendahuluan

Perubahan iklim menjadi isu global yang mendesak ditangani. Kenaikan emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas manusia telah memicu berbagai dampak negatif, seperti pemanasan global, perubahan pola cuaca, dan peningkatan permukaan laut.<sup>160</sup>

Saat ini Dunia tengah memasuki fase pendidihan di mana Copernicus Lembaga *independent* pemerhati cuaca eropa, mengeluarkan data per agustus bahwa panas bumi meningkat hingga 1,5 derajat celcius.<sup>161</sup> Oleh karena itu diperlukan solusi untuk mereduksi ini, pemerintah tengah menggalakan program Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan sejak tahun 2016.<sup>162</sup>

Sementara itu Bursa efek Indonesia (PT. BEI) telah merilis Indonesian Stock Exchange Carbon atau bursa karbon pada tahun 2023 yang diresmikan langsung oleh Ir. Jokowi Dodo selaku Presiden Republik Indonesia.<sup>163</sup> Tujuan utama bursa karbon adalah untuk mendorong pengurangan emisi GRK secara keseluruhan. Dengan menetapkan batas emisi dan memungkinkan perdagangan emisi, bursa karbon menciptakan insentif bagi entitas untuk mengurangi emisi mereka<sup>164</sup>.

160 Tria Patrianti, dkk, (2020). Komunikasi Risiko Pemerintah Pada Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Mengatasi Perubahan Iklim, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik 24 (2), 156

161 Copernicus Uni Eropa, " Global Temperature trend monitor", Diakses melalui <https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/software/app-c3s-global-temperature-trend-monitor?tab=app> diakses pada tanggal 30 Maret 2024

162 SDGS Indonesia," Jusuf Kalla Wakil Presiden Republik Indonesia pada segmen Tingkat tinggi mengenai hak atas Pembangunan", diakses melalui <https://sdgs.bappenas.go.id/pidato-bapak-m-jusuf-kalla-wakil-presiden-republik-indonesia-pada-segmen-tingkat-tinggi-mengenai-hak-atas-pembangunan-new-york-22-september-2016/>, diakses pada tanggal 01 April 2024

163 RRI, "Jokowi luncurkan bursa karbon indonesia", diakses melalui <https://www.rri.co.id/nasional/379499/presiden-jokowi-luncurkan-bursa-karbon-indonesia>, diakses pada tanggal 01 April 2024

164 Wilda Prihatiningtyas, dkk,(2023). Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan

Platform ini menawarkan Solusi atas emisi karbon dan sebagai dukungan pembangunan berkelanjutan. Melalui transaksi perizinan kredit karbon antar perseoran yang terdaftar dalam bursa karbon.<sup>165</sup> Melalui dua produk perdagangan *pertama* pembatasan dan perdagangan yang umumnya diterapkan pada Pasar Karbon wajib, dan *kedua* Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dengan pasar carbon unit sebanyak 1.379.851 dan jumlah partisipan 53.<sup>166</sup>

Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) menyoroti kebijakan ini, bahwa perdagangan karbon merupakan jalan sesat dalam menanggulangi perubahan iklim, karena hanya sebuah modus untuk finansialisasi alam.<sup>167</sup> Kemudian dampak dari perdagangan karbon ini mengakibatkan hilangnya tempat tinggal masyarakat adat yang tinggal di alam.<sup>168</sup> Sebab perusahaan yang besar memiliki cadangan dana tinggi akan mampu membeli perizinan emisi dari perusahaan lain. Oleh karena itu sangat penting untuk melihat apakah perdagangan carbon melalui bursa ini berpeluang sebagai program guna mereduksi kerusakan lingkungan atau malah menjadi ancaman bagi kelangsungan ekologis dan masyarakat.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam karya ini adalah normatif yuridis dengan analisis deskriptif melalui pendekatan studi kepustakaan.<sup>169</sup> Kodifikasi bahan kajian menggunakan sumber hukum primer yakni perundang-undangan, sumber hukum sekunder melalui karya ilmiah atau rancangan perundang-undangan, dan sumber hukum tersier

---

Perdagangan Karbon (Carbon Trading) di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim, *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 175

165 IDX Carbon "FAQ", diakses melalui <https://idxcarbon.co.id/id/frequently-asked-questions>, diakses pada tanggal 01 April 2024

166 IDX Carbin, "Data Daily", diakses melalui <https://idxcarbon.co.id/id/data-daily>, diakses pada tanggal 01 April 2024

167 Walhi "kertas posisi walhi perdagangan karbon jalan sesat atasi krisis iklim", diakses melalui <https://www.walhi.or.id/kertas-posisi-walhi-perdagangan-karbon-jalan-sesat-atasi-krisis-iklim>, diakses pada tanggal 01 April 2024

168 Berita Hita, "Walhi Perdagangan Karbon berdampak pengusuran masyarakat", diakses melalui <https://betahita.id/news/detail/9105/walhi-perdagangan-karbon-berdampak-pengusuran-masyarakat.html?v=1701962668>, diakses pada tanggal 01 April 2024

169 H. Salim HS (2013). Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 12

yang berasal dari kamus hukum maupun internet yang terakreditasi kredibilitasnya.<sup>170</sup>

Penelitian ini menggunakan teori Menurut Rawls, keadilan hukum dapat didefinisikan sebagai pengaturan institusi sosial dan distribusi sumber daya yang menghasilkan hasil yang paling adil bagi semua anggota masyarakat, terutama bagi mereka yang paling rentan. Dalam teorinya, Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan dasar:<sup>171</sup>

1. Prinsip Kesetaraan:

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk sistem paling luas dari kebebasan dasar yang kompatibel dengan kebebasan serupa untuk semua.

2. Prinsip Perbedaan:

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya boleh diperbolehkan jika mereka memberikan manfaat kepada yang paling rentan dalam masyarakat, terutama jika ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi yang paling tidak beruntung.

Selain itu teori yang dikemukakan Hans Kelsen, mengartikan hukum adalah tatanan perbuatan manusia, “Kesatuan sistem” menurut Kelsen adalah Sekumpulan norma-norma atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasah yang tujuan adalah untuk mewujudkan keadilan.<sup>172</sup> Dengan demikian untuk menegakkan keadilan lingkungan hidup terlebih dahulu harus mengetahui dan mengkaji sistem hukum yang ada, diantaranya legalitas, institusi dan sarana prasana, hukum lingkungan, berupa peraturan hukum, tanpa adanya legalitas terlebih dahulu maka keadilan tidak mungkin dapat diwujudkan

Kemudian untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal, dengan efisien dan efektif perlu dilakukan langkah pertama yakni analisis deskriptif terkait gap atau permasalahan mengenai program pemerintah transaksi bursa karbon dengan dampaknya kepada negara dan masyarakat.<sup>173</sup>

---

170 Ibid,16

171 Sunaryo, (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya”, Jurnal Konstitusi, 19 (1), 10

172 Budi Handoyo, (2017). Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara, Jurnal AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science, 2 (2) 175

173 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, (1990). Metode Penelitian Filsafat

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Gambaran umum bursa trading carbon di Indonesia

Salah satu strategi yang diusulkan untuk mengatasi perubahan iklim adalah melalui mekanisme perdagangan emisi karbon.<sup>174</sup> Mekanisme ini memungkinkan entitas yang melebihi batas emisi karbonnya untuk membeli kelebihan emisi dari pihak lain yang berada di bawah batas tersebut.<sup>175</sup>

Bursa karbon pertama didirikan di Chicago pada tahun 2003. Sejak saat itu, banyak negara dan wilayah di dunia telah meluncurkan bursa karbon mereka sendiri. Saat ini, terdapat lebih dari 60 bursa karbon yang beroperasi di seluruh dunia.<sup>176</sup>

Indonesia di tahun 2023 membentuk Bursa baru terkait perdagangan carbon dengan total partisipan 53 perusahaan.<sup>177</sup> Berikut beberapa regulasi sebagai dasar didirikannya IDX Carbon, yakni:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- b. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00295/BEI/09-2023 Tentang Peraturan Pendaftaran Unit Karbon Di Penyelenggara Bursa Karbon
- c. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00296/BEI/09-2023 Tentang Peraturan Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon
- d. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00297/BEI/09-2023 Tentang Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon
- e. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00298/BEI/09-2023 Tentang Peraturan Pengawasan Perdagangan Melalui Bursa Karbon

---

Yogyakarta: Kanisius, 83.

174 Valiant Alfarizy, dkk, (2023). Mekanisme Hukum: Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon di Indonesia", *jurnal Unnes Law Review* 6(2), 7356

175 Ade Bebi Irama (2020), *Perdagangan Karbon Di Indonesia: Kajian Kelembagaan dan Keuangan Negara*, *Jurnal Info Artha*, Vol 4. (1), 90

176 LinkedIn, "Pelajaran dari runtuhnya bursa karbon chicao climate", diakses melalui <https://www.linkedin.com/pulse/pelajaran-dari-runtuhnya-bursa-karbon-chicago-climate-nlcl/?originalSubdomain=id>, diakses pada tanggal 02 April 2024

177 Opcit, IDX Carbin, "Data Daily

Sementara itu Mekanisme penjualan emisi karbon sendiri telah dikenal Indonesia sejak tahun 2005 dengan menggunakan proyek Clean Development Mechanism (CDM) atau Mekanisme Pembangunan Bersih.<sup>178</sup> Kemudian Proyek CDM dilakukan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia yang bertujuan mendapatkan sertifikasi penurunan emisi (certified emission reduction) atau CER.<sup>179</sup>

Emisi karbon di Indonesia yang dapat diperdagangkan adalah karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), oksida nitrat (N<sub>2</sub>O), hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC) dan sulfur heksafluorida (SF<sub>6</sub>). Keenam jenis emisi ini adalah penyebab utama pemanasan global di planet ini dan pada akhirnya menyebabkan krisis iklim.<sup>180</sup>

Salah satu contoh Proyek yang dilaksanakan, yakni Katingan Mentaya, merupakan suatu usaha pemerintah dalam mengelola hutan sebagai lahan konservasi berkelanjutan dengan cara meminimalisir deforestasi dan degradasi hutan. Proyek ini dikelola oleh PT. Rimba Makmur Utama (RMU) yang mulai dirintis sejak tahun 2007. Akan tetapi, izin restorasi ekosistem (lisensi ERC) dari Kementerian Kehutanan yang semenjak tahun 2014 berganti menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru turun sekitar 5 tahun kemudian, yaitu di tahun 2013. Lambatnya penerbitan izin tersebut berimplikasi pada lambatnya proyek tersebut untuk dapat segera dijalankan. Merujuk pada P.36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perijinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung, disebutkan bahwa hanya pihak yang telah mendapatkan izin-lah yang memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon di atas tanah yang sudah dikenai konsesi diberikan oleh menteri.<sup>181</sup>

## **2. Analisa bursa trading carbon ancaman atau peluang**

Konsep keadilan dalam dimensi lingkungan hidup menjadi suatu pembahasan yang bersifat lintas sektoral dan lintas kepentingan.<sup>182</sup>

---

178 Rossi Margareth Tampubolon, (2022) Perdagangan Karbon: Memahami Konsep dan Implementasinya, Jurnal STANDAR: Better Standard Better Living 1 (3), 25

179 Opcit, Wilda Prihatiningtyas, dkk, 175

180 Agatha Sevilla Maharia, dkk, (2020) "Penggunaan Certified Emission Reductions Sebagai Bukti Objek Transaksi Carbon Crediting", Jurnal De Jure, 12 (2), 20

181 Opcit, Wilda Prihatiningtyas, dkk, 176

182 Ibid, 177

Dalam perspektif keadilan lingkungan, kondisi geografis setiap negara merupakan suatu ketentuan yang harus diperlakukan bijaksana dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia. Sementara Keadilan sosial menghendaki bahwa setiap anggota masyarakat memiliki sumber daya dan kekuasaan yang cukup untuk hidup secara layak sebagai manusia.<sup>183</sup>

Indonesia sebagai negara dengan emisi GRK terbesar keempat di dunia, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan bursa karbon.<sup>184</sup> Sebab Bursa karbon dapat mendorong industri untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi rendah karbon. Selain itu, bursa karbon juga dapat menarik investasi hijau ke Indonesia.

Di satu sisi, keberadaan bursa karbon dapat menjadi ancaman bagi Indonesia. Oleh karena terutama industri padat emisi, dapat mengalami peningkatan beban finansial jika mereka harus membeli emisi karbon untuk memenuhi batas yang ditentukan, sementara industri yang sudah memiliki finansial cukup akan terus menikmati, maka tidak sedikit perusahaan yang akan gulung tikar, selain itu ekologis lingkungan masyarakat jika perusahaan terus menerus menambah kuota emisi maka semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkan.

Sementara itu Praktik perdagangan karbon yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan fakta yang ironis. Salah satu contohnya yakni Katingan Mentaya Project di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Proyek ini mengalami beberapa masalah dalam praktiknya, diantaranya yaitu:<sup>185</sup>

- a. Masalah kebakaran hutan di Indonesia
- b. Menjadi praktik greenwashing bagi beberapa perusahaan
- c. Sengketa tanah/lahan dengan masyarakat local
- d. Area konservasi yang berbatasan dengan area industri perkebunan kelapa sawit

Kebijakan perdagangan karbon semestinya tidak mengabaikan kepentingan masyarakat adat hingga terjadi sengketa lahan yang memihak pada pengusaha. Sebaliknya, kebijakan ini justru harus mengakomodasi kepentingan masyarakat adat. Masyarakat harus

---

183 Ibid

184 Opcit, Tria Patrianti, dkk,163

185 Akhmad Jaki,(2022) Strategi Komunikasi Lingkungan Berbasis Carbon Trading pada PT. Rimba Makmur Utama”, Jurnal Ilmu Komunikasi 5 (2), 39

mendapatkan kedudukan yang seimbang untuk menerima manfaat dari perdagangan karbon, baik manfaat ekonomi langsung (insentif), manfaat ekologis, hidrologis dan jasa lingkungan lainnya, serta manfaat yang berbasis nilai keberadaan dan nilai guna di masa depan, antara lain seperti: perbaikan dalam sistem penguasaan lahan, promosi mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat lokal dan peningkatan konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana undang-undang terkait lingkungan hidup yang menyatakan bahwa menjamin kehidupan yang layak.

#### **D. Kesimpulan**

1. Strategi perdagangan emisi karbon merupakan solusi untuk mengatasi perubahan iklim dengan memungkinkan entitas melebihi batas emisi karbon membeli kelebihan emisi dari pihak lain. Bursa karbon pertama didirikan di Chicago pada 2003, dan Indonesia membentuk IDX Carbon pada 2023 dengan 53 perusahaan. Regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2023 menjadi dasar IDX Carbon. Penjualan emisi karbon melalui proyek Clean Development Mechanism (CDM) dikenal di Indonesia sejak 2005. Jenis emisi yang diperdagangkan meliputi CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFC, PFC, dan SF<sub>6</sub>. Contoh proyek seperti Katingan Mentaya menunjukkan pentingnya izin restorasi ekosistem (lisensi ERC) dalam menjalankan kegiatan penyimpanan dan penyerapan karbon sesuai regulasi.
2. Konsep keadilan dalam lingkungan hidup melibatkan lintas sektoral dan lintas kepentingan yang kompleks. Keadilan lingkungan mengakui hak asasi manusia untuk lingkungan hidup yang baik, sementara keadilan sosial menuntut kesetaraan akses terhadap sumber daya dan kekuasaan. Indonesia, sebagai negara dengan emisi GRK terbesar keempat di dunia, memiliki potensi besar dalam bursa karbon, namun tantangan muncul terutama terkait peningkatan beban finansial bagi industri padat emisi dan dampak negatif bagi masyarakat adat. Pentingnya kebijakan perdagangan karbon yang memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan lokal terungkap melalui praktik seperti Katingan Mentaya Project.



Kebijakan perdagangan karbon harus memperhatikan manfaat ekonomi, ekologis, dan keberlanjutan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## E. Daftar Pustaka

### Buku

Salim HS, H. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*. PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta

Bakker,Anton dan Charris Zubair,Achmad, (1990) *Metode Penelitian Filsafat*, Kanisius: Yogyakarta

### Jurnal

Valiant Alfarizy, Sayyidah Mariyatul Ulfa, Syerra S. Liyadi, Zhafira Farahiya, & Rohmad Ludiasa, (2023).Mekanisme Hukum: Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon di Indonesia, *Jurnal Unnes Law Review*, 6 (2), 7354-7365

Bebi Irama,Ade (2020) Perdagangan Karbon Di Indonesia: Kajian Kelembagaan dan Keuangan Negara," *Jurnal Info Artha*, 4 (1), 83-102

Handoyo,Budi, (2017). Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara. *Jurnal AL-IJTIMA 'I-International Journal of Government and Social Science*, 2 (2), 173-188

Jaki,Akhmad, (2022). Strategi Komunikasi Lingkungan Berbasis Carbon Trading pada PT. Rimba Makmur Utama, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5 (2), 38-49

Margareth Tampubolon,Rossi, (2022).Perdagangan Karbon: Memahami Konsep dan Implementasinya. *Jurnal STANDAR: Better Standard Better Living*, 1 (3), 25-29

Wilda Prihatiningtyas, Suparto Wijoyo, Indria Wahyuni, Zuhda Mila Fitriana, (2023). Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim, *Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2), 164-186

Agatha Sevilla Maharani, Muhamad Muhdar, Rahmawati Alhidayah. (2020). Penggunaan Certified Emission Reductions Sebagai Bukti Objek Transaksi Carbon Crediting. *Jurnal De Jure*, 12 (2), 18-31

Sunaryo, (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19 (1), 1-22

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14  
tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00295/  
BEI/09-2023 Tentang Peraturan Pendaftaran Unit Karbon Di  
Penyelenggara Bursa Karbon

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00296/  
BEI/09-2023 Tentang Peraturan Perdagangan Unit Karbon  
Melalui Penyelenggara Bursa Karbon

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00297/  
BEI/09-2023 Tentang Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00298/  
BEI/09-2023 Tentang Peraturan Pengawasan Perdagangan  
Melalui Bursa Karbon

### **Sumber Internet**

Berita Hita, (2023). Walhi Perdagangan Karbon berdampak pengusuran  
masyarakat

<https://betahita.id/news/detail/9105/walhi-perdagangankarbon-berdampak-pengusuran-masyarakat.html?v=1701962668>  
diakses pada tanggal 01 April 2024

IDX Carbon (2023), FAQ,

<https://idxcarbon.co.id/id/frequently-asked-questions> diakses pada  
tanggal 01 April 2024

IDX Carbon, (2023) Data Daily

<https://idxcarbon.co.id/id/data-daily> diakses pada tanggal 01 April 2024

RRI, (2023) Jokowi luncurkan bursa karbon indonesia

<https://www.rri.co.id/nasional/379499/presiden-jokowi-luncurkan-bursa-karbon-indonesia> diakses pada tanggal 01 April 2024

SDGS, (2016) Tingkat tinggi mengenai hak atas Pembangunan,

<https://sdgs.bappenas.go.id/pidato-bapak-m-jusuf-kalla-wakil-presiden-republik-indonesia-pada-segmen-tingkat-tinggi-mengenai-hak-atas-pembangunan-new-york-22-september-2016/> diakses pada tanggal 01 April 2024

Walhi, Kertas Posisi Walhi Perdagangan Karbon: Jalan Sesat Atasi Krisis Iklim, <https://www.walhi.or.id/kertas-posisi-walhi-perdagangan-karbon-jalan-sesat-atasi-krisis-iklim> diakses pada tanggal 01 April 2024